

LIBERALIST THEORIES OF WAR

Dewi Triwahyuni



International Security Studies
International Relations Department
UNIKOM , 2013

BEBERAPA PANDANGAN LIBERALIS :

- Berberda dengan realis, unit analisa Liberalis = individu & institusi non negara
- Dengan asumsi bawa institusi dianggap dapat mengurangi negara dari unsur interest pribadi yang memberikan dampak terhadap power
- Institusi adalah variabel independen dan mampu menghindarkan negara dari perang.



PANDANGAN DUA PARADIGMA:

REALIS

INSTITUSI INT'L



Distribusi Power
→ Alat untuk mencapai
kepentingan

LIBERALIS

INTSTITUSI INT'L



→ Dapat mengubah
perilaku negara
→ Menghindari perang



- Liberalis menolak pandangan bahwa politik sebagai hutan rimba dan lebih mengumpamakan menanam perang dan damai.
- Dibutuhkan **kerjasama antar aktor politik** yang dijalankan dengan damai dan diwujudkan dalam suatu struktur kelembagaan berupa **institusi atau organisasi internasional**
- Liberalis menolak “SELF HELP” untuk menciptakan perdamaian.



HARUS ADA:

KERJASAMA ANTAR AKTOR POLITIK INTERNASIONAL



MELALUI :

**STRUKTUR KELEMBAGAAN, YAITU:
INSTITUSI & ORGANISASI INT'L**



SISTEM INTERNASIONAL, DALAM ASUSMSI KAUM LIBERALIS:

- Lebih menekankan kepada penjelasan mengapa kerjasama ekonomi lebih menguntungkan atau memungkinkan
- Kerjasama tersebut akan mengurangi resiko perang
- Kecurangan dianggap sebagai faktor yang dapat menghambat kerjasama internasional
- Institusi akan memberikan jalan keluar untuk menghadapi persoalan
- Pembentukan institusi akan mengekang negara melakukan tindakan-tindakan berbahaya.

CAUSAL LOGICAL

(HUBUNGAN SEBAB AKIBAT) ASUMSI DIATAS:

- *Threat of cheating* (ancaman curang) merupakan rintangan utama menciptakan kooperatif
- Untuk memecahkan problem tsb maka setiap pihak membatasi yang lainnya dengan cara merumuskan collective interest.
- Institusi harus menangkal cheater dan melindungi korban namun secara fundamental tidak mengubah norma perilaku negara-negara tersebut.



WAR DALAM PANDANGAN LIBERALIS

- War = JUSTIFY (dibenarkan)
- Neo Liberalis = “war as a necessary evil”
- Artinya adalah perang sebagai sebuah kejahatan yang perlu dilakukan untuk perdamaian.
 - → dari sinilah lahir doktrin :
‘IUS AD BELLUM’, yang merupakan sebuah doktrin yang diciptakan sebagai prinsip-prinsip utama dalam berperang.

STRATEGI PERDAMAIAN LIBERALIS :

- 1) Menciptakan aktor keamanan baru, dimana liberalis cenderung menciptakan pembentukan sebuah institusi dan menyelesaikan konflik.
- 2) Menciptakan keamanan yang uni dimensional, strategi yang kedua ini menurunkan teori functionalism, integrasi dan teori fungsi integrasi.
- 3) Pengaturan resource, yaitu distribusi resource/ sumber daya, melalui prinsip-prinsip kapitalisme, dengan interaksi *positive sum game*.


3 PRINSIP DASAR LIBERALIS YANG DAPAT MENCIPTAKAN KEHIDUPAN INTERNASIONAL YANG DAMAI:

1. DEMOKRASI
2. FREE MARKETS
3. MENGEDEPANKAN ORGANISASI INTERNASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM RESOLUSI KONFLIK



TEORI FUCTIONALISM (DAVID MITRANY)

David Mitrany menyebutnya dengan “WORKING PEACE SYSTEM” dimana sistem perdamaian dibagi 3 kategory:

- a) INKLUSIF/EKSLUSIF, sebagai model institusi politik dianggap sebagai salah satu pendekatan yang baik dalam mengakomodasi nilai-nilai dan kebutuhan sosial-ekonomi individu.
 - b) PROSES EKONOMI-SOSIAL, digambarkan sebagai “economic interdependence” terutama dalam pembangunan teknologi global.
 - c) EVOLUSI DIALEKTIKAL, ada dugaan bahwa progresifitas sejarah terjadi atas proses dialektika.
- 

TEORI INTEGRASI

- Berhubungan dengan adanya proses-proses integrasi berdasarkan kepentingan ekonomi, seperti uni eropa, atau nafta

TEORI FUNGSIONAL INTEGRASI

- Dalam teori ini ditegaskan secara jelas, batas-batas yang mengatur hubungan militer antar negara, kerjasama militer yang dibenarkan dalam libralisme hanyalah yang bersifat institutionalization (misalnya: *collective security / defense pact*)

The left side of the slide features a series of vertical stripes in shades of brown, tan, and grey. Overlaid on these stripes are several orange circles of varying sizes, arranged in a cluster that tapers towards the bottom.

DEMOCRATIC PEACE THEORY

AWAL PEMIKIRAN

- 1795 : Immanuel Kant dalam essay-nya: “*Perpetual Peace*” Mengatakan bahwa sebagian besar rakyat itu tidak akan memilih berperang, kecuali untuk mempertahankan diri, karena pada dasarnya merekalah yang akan menanggung beban perang tersebut.
- Oleh karena itu, jika semua negara menjalankan demokrasi, maka rakyat sebagai pemegang kedaulatan, tidak akan memilih untuk berperang, sehingga perang dengan sendirinya akan berakhir.



TEORI DEMOKRASI SEBAGAI DASAR PEMIKIRAN

- Demokrasi (liberal) adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.



PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA:

- Kekuasaan mayoritas;
- Hak-hak minoritas;
- Kedaulatan rakyat;
- Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah;
- Jaminan hak asasi manusia;
- Pemilihan yang bebas dan jujur;
- Persamaan dalam hukum;
- Pluralisme sosial, ekonomi dan politik;
- Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat;
- Pembatasan pemerintah secara konstitusional.



Why Democratic States never Fight
with another Democratic State ?



Zeev Maos dan Bruce Russet (1993)

Pernjelasan Struktural

Pernjelasan Normatif



PENJELASAN STRUKTURAL

- suatu negara yang menganut sistem demokrasi maka prosedur pembuatan kebijakannya memiliki hambatan struktural (*checks and balances*). Hambatan seperti inilah yang dipercayai dapat mencegah negara demokrasi memasuki ranah peperangan.
- struktural menyatakan bahwa para elit di negara yang menganut sistem demokrasi dikendalikan oleh rakyat negaranya, sehingga menyebabkan upaya untuk mobilisasi perang dapat dihambat.



- Satu jenis penjelasan struktural lainnya menyatakan bahwa proses berdemokrasi seperti kebebasan berbicara dari rakyat dapat membuat negara demokrasi terhindar dari hal-hal yang bisa memunculkan kesalahpahaman, karena publik tidak akan pernah menginginkan negaranya terjerumus dalam perang



PENDEKATAN NORMATIF

Penjelasan normatif memiliki dua asumsi yang penting :

- (PERTAMA), norma-norma yang dimiliki negara-negara demokrasi diyakini dapat mencegah perang diantara mereka. Salah satu argumen ini menilai bahwa negara yang menganut sistem liberal tidak akan memerangi negara liberal lainnya, karena hal itu dapat melukai prinsip-prinsip pokok dalam liberalisme itu sendiri.



- satu jenis penjelasan struktural lainnya menyatakan bahwa proses berdemokrasi seperti kebebasan berbicara dari publik dapat membuat negara-negara demokrasi terhindar dari hal-hal yang dapat menimbulkan kesalahpahaman (*missperception*), karena publik tidak akan menghendaki negaranya terjerumus dalam perang.



- (KEDUA), demokrasi memiliki suatu norma yang diwujudkan dalam bentuk resolusi damai atas konflik. Norma-norma tersebut penerapannya pada resolusi damai atas konflik. Seperti yang kita ketahui dalam menyelesaikan konflik domestik, negara demokrasi melakukannya tanpa kekerasan, dan melalui itulah mereka dapat menyelesaikan perselisihan internasional mereka secara damai.






KRITIK TERHADAP TEORI “DEMOCRATIC PEACE”

THOMAS HOBBS (1588-1679)

- Rakyat tidak akan dapat dipercaya untuk dapat membuat keputusan tersendiri sebagaimana yang diterapkan negara demokrasi karena sifat rakyat yang cenderung mementingkan diri mereka sendiri.
- Watak alami manusia adalah jahat dan tidak dapat dipercaya untuk memerintah menurutnya rakyat tidak dapat dipercaya untuk membuat keputusan tersendiri sebagaimana diterapkan dalam sistem demokrasi karena rakyat cenderung mementingkan kepentingan mereka sendiri (*selfishly motivated*).
- Watak alami rakyat adalah jahat dan tidak dapat dipercaya untuk memerintah.



PLATO

- Penerapan demokrasi pada masa Yunani Kuno, yaitu tentang kekalahan Athena dalam peperangan Peloponesia pada 404 SM. Menurut Plato, kekalahan yang didapatkan oleh Athena tersebut akibat ketidakmampuan sistem demokrasi untuk memenuhi kebutuhan rakyat dibidang politik, moral dan spiritual.
 - Meninggalnya guru Plato, yaitu Socrates akibat rekayasa hukuman dari pemerintah demokrasi Athena. Kejadian yang membuat trauma tersebut membuat Plato berkesimpulan bahwa sistem pemerintahan demokrasi tidak baik karena didalamnya dipenuhi kebobrokan (dekadensi) moral para penguasa demokrasi Athena saat itu.
- 

NOREENA HERTZ

- menurutnya praktik demokrasi secara penuh sudah dibajak oleh kekuatan korporasi-korporasi internasional yang kuat dan mampu mempengaruhi dan menaklukkan negara-negara dengan kekuatan modalnya.
- Para pemimpin politik pada zaman ini, meski dipilih melalui pemilihan umum, cenderung melayani kepentingan korporasi multinasional yang sejak empat dekade ini merupakan aktor ekonomi politik internasional yang sangat penting disamping negara. Kondisi inilah yang menyebabkan terancamanya demokrasi pada suatu negara sehingga terjadi *the death of democracy*





CONTOH KASUS

AMERIKA SERIKAT VS CHILI

- pemerintah Amerika Serikat berniat untuk menggulingkan seorang penguasa yang terpilih secara demokratik Presiden Salvador Allende di Chili, dan menempatkan pembunuh yang kejam (Pinochet) seorang otoriter yang bersahabat dengan AS ditampuk kekuasaan Chili.
- Chili, meskipun pemilunya berlangsung dengan sangat demokratis, agaknya sulit bagi Teori Perdamaian Demokratik untuk menjelaskan mengapa negara-negara seperti AS tidak mau mengakui Chili sebagai negara demokrasi.
- Sejumlah studi menunjukkan bahwa pada 1970, Chili tercatat sebagai salah satu negara demokratis yang sangat stabil dan awet di Amerika Latin. Pemilihan pada tahun 1970 membawa Salvador Allende, kandidat yang didukung oleh koalisi sayap kiri *Popular Unity*, ke tampuk kekuasaan. Kebijakan ekonominya yang bertujuan untuk mereformasi redistribusi yang melawan kepentingan pribadi elit, termasuk kepentingan ekonomi Amerika di Chili.



AMERIKA SERIKAT VS HAMAS

- Dalam pemilu legislatif Palestina pada 25 Januari 2006 yang berhasil dimenangkan oleh Hamas sedikit banyaknya telah mengubah peta dan arus perpolitikan Palestina. Hamas menang telak dengan perolehan 80 kursi dari 120 kursi parlemen.
 - AS sangat mendukung Fatah sebagai partai oposisi untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Konflik berlanjut dimana Hamas mendapat tekanan dari dunia barat termasuk AS, Eropa, Israel dan saudaranya sendiri Fatah.
 - AS pernah memasukkan negara-negara sahabat yang non-demokratik tetapi bisa dipercaya seperti Mesir, Saudi Arabia, Pakistan, Singapura, Indonesia dimasa presiden Soeharto, Yugoslavia, Portugal, Spanyol, Turki dan banyak negara Amerika latin lainnya sebelum trend demokrasi dikumandangkan.
- 